

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan serta hasil yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka Kesimpulan yang dapat diambil dari adanya penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi Studi Kasus Pelestarian Ondel–Ondel di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan point pentingnya adalah kebijakan ini terimplementasi dengan baik tetapi belum maksimal dengan penjabaran dimenis sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada dimensi ini peneliti sudah mewawancarai beberapa informan yang menjadi Narasumber yang tepat untuk dapat mengetahui apa tujuan dari adanya kebijakan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 11, dan apakah seluruh lapisan Masyarakat, khususnya Masyarakat yang bersinggungan langsung dengan Upaya pelestarian ondel – ondel sebagai salah satu ikon budaya Betawi sudah mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Rangkaian wawancara telah dilakukan kepada 7 informan dari berbagai instansi baik pemerintah, pelaku kesenian, pengusaha, dan juga kepada perwakilan masyarakat, hasil dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 11 adalah untuk memperkenalkan budaya lokal kepada Masyarakat. Selain mengenal budaya lokal, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan melindungi warisan budaya sebagai jati diri kota Jakarta, sehingga ikon kota Jakarta tetap Lestari, khususnya ondel - ondel. Kemudian kebijakan tentang ikon budaya Betawi ini pun dianggap berhasil terdistribusi dengan baik pemahamannya dimasyarakat, hal ini dapat diketahui pada saat kegiatan wawancara dengan perwakilan instansi

pemerintah, pelaku kesenian, pengusaha, dan juga masyarakat sipil mereka dapat mengetahui dan memahami dengan baik terkait kebijakan ini. Tak hanya itu, bahkan peraturan ini pun dijalankan dengan cukup baik khususnya di daerah perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan yang menjadi salah satu lokasi percontohan dalam hal pelestarian budaya Betawi.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dari sisi sumber daya manusia, para informan berkomentar bahwa kuantitas staff yang bertugas di Suku Dinas Kebudayaan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah sanggar dan pelaku budaya dan kesenian yang harus dibina dan dimonitor. Dalam satu kecamatan hanya terdapat satu orang dari Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan yang bertugas memonitor dan mengurus berbagai keperluan administrasi dari pelaku seni di Jakarta Selatan. Terbatasnya sumber daya manusia berdampak pada minimnya pergerakan mereka untuk melakukan aktivitas pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jumlah sumber daya manusia yang tidak sesuai akhirnya menyebabkan sumber daya waktu yang dimiliki menjadi lebih sedikit karena harus membagi waktu sedemikian rupa untuk dapat membina sekian banyak sanggar kebudayaan, dan pelaku seni. Kemudian apabila dilihat dari sisi sumber daya material pemerintah berusaha untuk membuat Masyarakat tertarik untuk menikmati pertunjukan seni dan budaya khususnya ondel – ondel dengan cara membangun fasilitas publik yang baik seperti ruang untuk pertunjukkan agar Masyarakat tertarik untuk meramaikan pertunjukkan serta merasa nyaman dengan fasilitas pendukung didalamnya. Membahas terkait sumber daya, waktu juga merupakan salah satu unsur dalam sumber daya. Dalam penelitian ini sumber daya waktu yang dimiliki untuk proses implementasi kebijakan tentunya sangat tidak terbatas karena pemerintah tidak memiliki target

waktu untuk menyelesaikan kebijakan ini. Pelestarian harus dilakukan secara terus menerus tanpa batas waktu, karena yang menjadi target dari kebijakan ini adalah Seni dan Budaya lokal termasuk ondel – ondel didalamnya dapat terus bertahan eksistensinya dimasyarakat sebagai identitas dan jati diri kota Jakarta.

3. Karakteristik Para Pelaksana

Dalam dimensi ini membahas bagaimana sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan bagaimana dukungan yang dilakukan para agen pelaksana. Implementasi kebijakan pelestarian ondel-ondel melibatkan berbagai agen pelaksana, baik individu maupun organisasi, yang memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Dimensi karakteristik para pelaksana, yang mencakup sikap, dukungan, dan peran kelembagaan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa lembaga dan pihak terkait yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan pelestarian budaya Betawi ini.

Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan unit-unit lain seperti UPK PBB serta Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan berfungsi sebagai agen pelaksana yang memiliki peran dan bidang masing-masing dalam mendukung pelestarian ondel-ondel. Mereka menjalankan berbagai program seperti workshop, pagelaran seni, dan pembinaan untuk memastikan keberlangsungan kebudayaan ini. Meskipun terdapat dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, pelaksana masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pembinaan seniman jalanan, kurangnya antusiasme masyarakat terhadap pelatihan, dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku seni. Secara keseluruhan, efektivitas implementasi kebijakan ini bergantung pada komitmen dan konsistensi pemerintah serta koordinasi antara berbagai agen pelaksana. Hambatan yang ada perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih baik untuk memastikan bahwa kebijakan pelestarian ondel-ondel dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pelaku seni.

4. Disposisi Para Pelaksana

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dua peraturan utama untuk pelestarian kebudayaan Betawi: Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang bersifat umum dan Pergub Nomor 11 Tahun 2017 yang lebih spesifik mengatur ikon budaya, termasuk ondel-ondel. Pengelolaan ondel-ondel di Jakarta Selatan dilakukan oleh seksi pemanfaatan dengan fokus pada ondel-ondel statis dan dinamis. Walaupun ada upaya sosialisasi, banyak masyarakat yang hanya mengetahui Pergub 2017 dan kurang familiar dengan Perda 2015, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyebaran informasi mengenai peraturan tersebut. Implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan berdedikasi, serta pada upaya edukasi dan sosialisasi yang rutin. Koordinasi antar lembaga dan komunikasi dengan masyarakat juga krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran biasanya berupa pembinaan dan sosialisasi, bukan sanksi administratif atau pidana. Sementara aparat penegak hukum seperti Satpol PP menangani pelanggaran yang mengganggu kenyamanan publik, pelaksanaan kebijakan pelestarian ondel-ondel lebih banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif. Secara keseluruhan, meskipun masyarakat dan pelaku seni ondel-ondel mengetahui kebijakan, implementasi kebijakan pelestarian ondel-ondel cenderung efektif melalui pembinaan dan kurang teridentifikasi adanya pelanggaran berat di lapangan.

5. Hubungan Antar Organisasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan kolaborasi yang efektif antara berbagai lembaga dalam pelestarian budaya ondel-ondel sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017. Koordinasi antara Suku Dinas Kebudayaan, UPK PBB, dan ketua satuan pelaksana kebudayaan di kecamatan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan kolaboratif seperti acara peringatan HUT DKI Jakarta dan pameran budaya. Validasi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa sinergi antar

lembaga untuk pelestarian ondel-ondel di perkampungan budaya Betawi telah terealisasi dengan baik, mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas budaya Betawi, termasuk kelompok seni ondel-ondel, memainkan peran penting dalam pelestarian budaya. Masyarakat setempat dan pelaku seni ondel-ondel melaporkan bahwa mereka telah terlibat dalam sosialisasi, pelatihan, dan promosi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Konfirmasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan penggiat seni, menunjukkan bahwa koordinasi dan manajemen kebudayaan telah berjalan dengan baik. Pemerintah melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas untuk pelaku seni, sementara masyarakat terlibat dalam upaya pelestarian budaya, termasuk workshop dan acara komunitas. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pelestarian budaya ondel-ondel di Jakarta telah berhasil melalui koordinasi antar lembaga dan kolaborasi dengan masyarakat. Keberhasilan ini bergantung pada kerja sama yang efektif antara pemerintah, lembaga kebudayaan, dan komunitas lokal dalam mencapai tujuan pelestarian budaya yang ditetapkan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi berperan signifikan dalam pelestarian ondel-ondel. Dukungan ekonomi dari anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya sangat penting untuk kegiatan seperti festival dan pembuatan ondel-ondel. Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan mendapat manfaat dari pengembangan ekonomi di sekitarnya, dengan adanya usaha seperti makanan, souvenir, dan wisata yang meningkatkan pendapatan dan memberikan honor kepada pelaku seni. Peningkatan fasilitas umum juga mendukung perkembangan ekonomi yang positif di kawasan ini. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang baik mendukung keberhasilan pelestarian ondel-ondel. Keberhasilan pelestarian ondel-ondel sangat bergantung pada dukungan dan penerimaan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas budaya Betawi, termasuk kelompok seni tradisional, sangat penting untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi dalam pelestarian budaya. Masyarakat setempat yang aktif terlibat dalam pelestarian, melalui kelompok seni dan kegiatan budaya, berperan penting dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hubungan yang baik antara pemerintah dan komunitas lokal memfasilitasi partisipasi aktif dan dukungan terhadap pelestarian ondel-ondel. Dukungan politik dari berbagai tingkat pemerintahan adalah krusial untuk implementasi Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2017. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan lembaga legislatif diperlukan untuk memastikan adanya dukungan politik yang konsisten. Advokasi dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah juga penting untuk pelestarian ondel-ondel. Dukungan politik yang kuat dan koordinasi antar lembaga memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Secara keseluruhan, pelestarian ondel-ondel yang sukses memerlukan perhatian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Semua elemen ini harus berfungsi secara sinergis untuk mendukung implementasi kebijakan dan memastikan keberhasilan pelestarian budaya Betawi ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2017 tentang pelestarian ondel-ondel, beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelestarian budaya Betawi adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia:

- **Penambahan Staf:** Pertimbangkan untuk menambah jumlah staf di Suku Dinas Kebudayaan, terutama di kecamatan yang memiliki banyak sanggar dan pelaku seni. Peningkatan jumlah staf akan memungkinkan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.
- **Pelatihan dan Pengembangan:** Berikan pelatihan tambahan bagi staf untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pembinaan dan pengelolaan kegiatan budaya.

2) Optimalisasi Sumber Daya Material:

- **Fasilitas yang Lebih Baik:** Lanjutkan dan tingkatkan pembangunan fasilitas publik untuk mendukung pertunjukan seni dan budaya. Pastikan fasilitas yang ada selalu dalam kondisi baik dan memadai untuk acara-acara budaya.
- **Pendanaan:** Usahakan untuk mendapatkan tambahan pendanaan dari sumber lain seperti sponsor atau kerjasama dengan sektor swasta untuk mendukung kegiatan pelestarian.

3) Pengelolaan Waktu:

- **Perencanaan dan Prioritas:** Buat perencanaan yang lebih terstruktur dengan jadwal yang realistis untuk setiap kegiatan pelestarian. Tentukan prioritas kegiatan agar waktu dapat digunakan dengan lebih efisien.
- **Target Jangka Panjang:** Walaupun pelestarian adalah usaha berkelanjutan, tetapkan target jangka panjang yang dapat diukur untuk memantau kemajuan dan mengatur strategi yang diperlukan.

4) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi:

- **Penyuluhan Berkelanjutan:** Perkuat sosialisasi dan edukasi mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 11 Tahun 2017 kepada masyarakat. Gunakan berbagai media dan platform untuk memastikan informasi ini mencapai lebih banyak orang.
- **Kampanye Kesadaran:** Selenggarakan kampanye kesadaran yang melibatkan masyarakat dan pelaku seni untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan.

5) Koordinasi Antar Lembaga:

- **Koordinasi yang Lebih Baik:** Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Suku Dinas Kebudayaan, UPK PBB, dan

ketua satuan pelaksana kebudayaan, untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.

- **Pertemuan Rutin:** Adakan pertemuan rutin antara lembaga-lembaga terkait untuk mengevaluasi kemajuan, mengatasi masalah yang muncul, dan merencanakan kegiatan bersama.

6) Dukungan dari Masyarakat dan Politik:

- **Partisipasi Masyarakat:** Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian ondel-ondel dengan melibatkan mereka lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya.
- **Dukungan Politik:** Upayakan untuk memperoleh dukungan politik yang kuat dari berbagai tingkat pemerintahan untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Koordinasi dengan lembaga legislatif dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendapatkan dukungan yang berkelanjutan.

7) Peningkatan Program Pembinaan:

- **Program Inovatif:** Kembangkan program pembinaan yang lebih inovatif dan menarik untuk pelaku seni, sehingga mereka lebih termotivasi dan dapat mengembangkan keterampilan mereka.
- **Evaluasi dan Umpan Balik:** Lakukan evaluasi berkala terhadap program pembinaan dan kumpulkan umpan balik dari pelaku seni untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 11 Tahun 2017 tentang pelestarian ondel-ondel dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelestarian budaya betawi dan masyarakat Jakarta.